

# **Perbandingan Reformasi Ekonomi Vietnam dan Laos: Pengaruh Relasi *Mentor – Mentee* dalam Progresivitas Reformasi Ekonomi Tahun 1986 - 2008**

**Widyastuti Septiyaningrum**

**NIM 071311233024**

## **Abstrak**

*Tren perekonomian kontemporer menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian negara. Hal ini juga diimplementasikan oleh beberapa negara dengan sistem pemerintahan komunis, diantaranya adalah Tiongkok, dan diikuti oleh negara-negara komunis lain seperti Vietnam dan Laos. Dalam perkembangannya, reformasi ekonomi setiap negara memiliki progresivitas yang berbeda, bergantung pada strategi setiap negara untuk memaksimalkan potensi internal dan kondisi kawasan. Penelitian ini berfokus untuk membandingkan reformasi ekonomi Vietnam dan Laos yang memiliki persamaan dalam latar belakang reformasi, strategi, serta kondisi negara, namun mencapai progresivitas yang berbeda, yang mana Vietnam lebih progresif dibanding Laos. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut, yaitu strategi, posisi, dan relasi mentor – mentee yang dilakukan Vietnam dan Laos. Pertama, faktor strategi mengacu pada model reformasi ekonomi gradualist, yaitu analisis terhadap kebijakan liberalisasi ekonomi secara bertahap. Penelitian ini mengkritik bahwa analisis model gradualist terlalu berfokus pada pengaruh internal negara, dan tidak mampu mengelaborasi pengaruh eksternal dalam reformasi ekonomi Vietnam dan Laos, yaitu pengaruh integrasi ekonomi dan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Oleh karena itu, penulis menganalisis pengaruh eksternal melalui faktor kedua yaitu posisi dan ketiga adalah relasi mentor – mentee. Faktor kedua adalah analisis terhadap cara Vietnam dan Laos mempersepsikan posisi negara dalam integrasi ekonomi, baik dalam tingkat regional maupun ekonomi politik internasional. Faktor ketiga adalah relasi mentor – mentee, yaitu hubungan asimetris antara Tiongkok sebagai mentor, dan Vietnam – Laos sebagai mentee. Analisis ini berfokus untuk membandingkan cara Vietnam dan Laos memanfaatkan hubungan dengan Tiongkok sebagai negara komunis yang berhasil melakukan liberalisasi ekonomi dan menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh di kawasan.*

**Kata-kata Kunci:** *reformasi ekonomi, liberalisasi ekonomi, ekonomi komunis, reformasi gradualist, relasi mentor – mentee.*

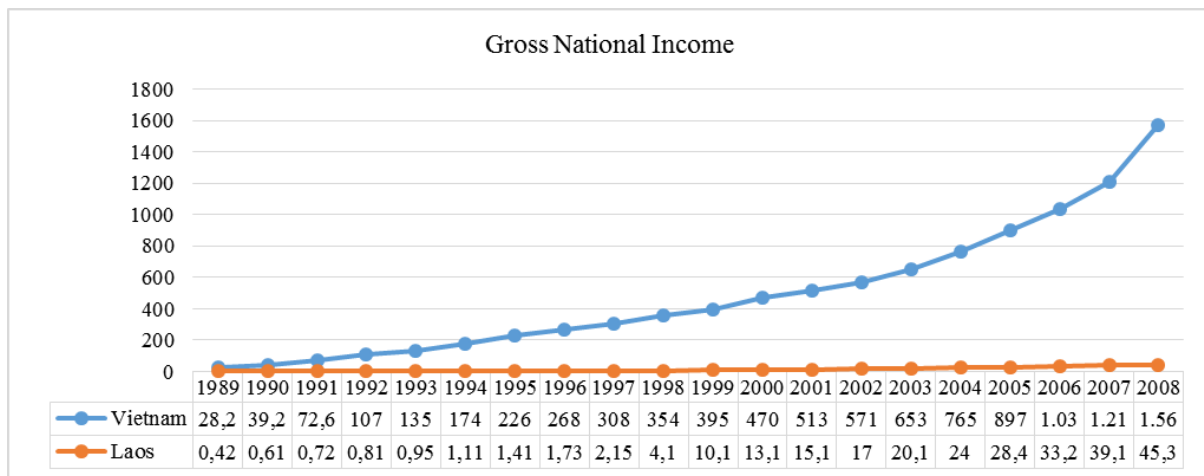
*Contemporary economic trends show that economic liberalization is the right strategy to improve the economic conditions of the country. It is also implemented by several countries with communist government system, including China, and followed by other communist countries like Vietnam and Laos. Economic reform of each country has different progressiveness, depending on the strategy of each country to maximize the internal potential and the condition of the region. This study focuses on comparing economic reforms performed by Vietnam and Laos, that have similarities in the background of state reform, strategy, and conditions, but achieving different progress, which Vietnam is more progressive than Laos. There are three main factors that affect the condition; strategy, position, and mentor - mentee relations. First, the strategy factor refers to gradualist model of economic reform, which is analyzing the policy of step-by-step economic liberalization. This study criticizes that the gradualist model analysis is restricted to the internal influence, and unable to elaborate the external influences in Vietnam and Laos, including the influence of economic integration and economic cooperation with China. Therefore, the author analyze the external influences through the second factor about the position and the third is the mentor-mentee relations. The second factor is an analysis of how Vietnam and Laos perceive the state's position in economic integration, both at the regional and international political levels. The third factor is the mentor-mentee relations, the asymmetric relationship between the Chinese as the mentor, and the Vietnamese - Laos as mentees. This analysis focuses on comparing the way in which Vietnam and Laos benefitted on relations with China as a communist country that successfully liberalizes the economy and becomes an influential economic actor in the region.*

**Keywords:** *economic reform, economic liberalization, communist economy, gradualist reform, mentor-mentee relations.*

Reformasi ekonomi Vietnam dilakukan dengan strategi yang disebut dengan *Doi Moi* (renovasi) yang disahkan oleh Kongres ke-6 Partai Komunis Vietnam pada tahun 1986 (Gates, 1995). Vietnam memadukan kebijakan ekonomi dan sosial untuk tetap mempertahankan praktik sosialisme. Sedangkan reformasi ekonomi Laos mulai dilakukan pada tahun 1987, yang mana Kongres ke-4 Lao People's Revolutionary Party (LPRP) membentuk strategi ekonomi baru yang disebut dengan *Chin Tanakan Mai*, yang artinya cara berpikir baru atau kebijakan renovasi, dan lebih sering disebut dengan New Economic Mechanism (NEM). Vietnam dan Laos memiliki kondisi dan situasi yang sama dalam beberapa hal, diantaranya adalah; pertama, persamaan latar belakang dan momentum reformasi ekonomi. Vietnam dan

Laos melakukan reformasi ekonomi sebagai adaptasi terhadap runtuhnya komunisme Uni Soviet. Kondisi ini menyebabkan Vietnam dan Laos kehilangan dukungan finansial sebagai negara satelit komunis. Vietnam dan Laos melakukan reformasi ekonomi dalam kurun waktu yang sama, yaitu akhir tahun 1980an. Kedua, letak geografis Vietnam dan Laos yang berada pada sub-regional yang sama. Implikasinya adalah Vietnam dan Laos mendapatkan pengaruh regionalisme yang sama. Apabila terjadi krisis politik maupun ekonomi dalam tataran regional, Vietnam dan Laos dapat terdampak secara bersamaan. Ketiga, persamaan dalam model reformasi yang digunakan, yaitu model reformasi Asia Timur atau model Tiongkok dengan reformasi ekonomi gradualis dan mempertahankan sistem partai tunggal dalam perpolitikannya.

**Grafik 1. Perbandingan Pendapatan Nasional Vietnam dan Laos**



Data dalam Trilyun USD

Sumber: World Bank

Meskipun Vietnam dan Laos memiliki persamaan dalam latar belakang maupun proses reformasi ekonominya, keduanya tidak menunjukkan hasil reformasi yang sama, yang mana Vietnam justru lebih progresif dibanding Laos. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan Vietnam lebih besar daripada yang terjadi di Laos. Vietnam bahkan seringkali menunjukkan peningkatan secara drastis. Pada awal reformasi ekonominya, Vietnam mencapai peningkatan drastis pada tahun 1991, yaitu empat tahun setelah reformasi ekonomi mulai dilakukan. Sedangkan peningkatan ekonomi Laos yang signifikan baru terlihat pada tahun 1999, yang mana dua belas tahun setelah reformasi ekonominya. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Vietnam dan Laos. Jangkauan penelitian ini diambil dari tahun 1986 hingga tahun 2008. Tahun 1986 dipilih karena merupakan periode awal Vietnam dan Laos melakukan reformasi ekonomi, yang dalam prosesnya juga terkait dengan relasi ekonomi yang bersifat *mentor – mentee* dengan Tiongkok. Sedangkan tahun 2008 dipilih karena

momentum krisis finansial global yang mempengaruhi perekonomian di Asia. Sehingga penelitian ini tidak menganalisis dampak dari fluktuasi ekonomi di kawasan terhadap reformasi ekonomi.

Reformasi negara post-komunis memiliki model dan strategi yang berbeda-beda. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis, dapat berupa kondisi teritorial dan regionalisme, faktor latar belakang sejarah, serta faktor integrasi yang dilakukan negara post-komunis dengan tata kelola ekonomi politik internasional. Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang menganalisis reformasi negara post-komunis, peneliti memutuskan untuk menganalisis reformasi ekonomi Vietnam dan Laos melalui dua pendekatan, yaitu strategi reformasi gradualis sebagai pengaruh internal, dan integrasi dengan ekonomi politik internasional sebagai pengaruh faktor eksternal. Pendekatan faktor eksternal jarang dieksplorasi dalam penelitian berkaitan reformasi ekonomi negara komunis. Penulis mengacu pada Jacoby (2005) yang menjelaskan tiga poin penting dari pendekatan faktor eksternal dalam mempengaruhi model dan kesuksesan reformasi ekonomi negara post-komunis, yaitu pertama pengaruh inspirasi, yaitu aliran ide atau pemikiran yang mendasari dirubahnya bentuk institusi, kebijakan, maupun ide untuk membentuk kebijakan yang baru. Kedua, pengaruh subsidi, yaitu pengaruh eksternal yang mendukung reformasi ekonomi, diantaranya dana bantuan, akses pasar, dan bantuan teknis semacamnya. Ketiga, pengaruh substitusi yaitu mekanisme baru yang ditawarkan faktor eksternal untuk mengimbangi tidak adanya institusi atau mekanisme terkait dalam mendukung reformasi yang dilakukan. Pada kasus Laos dan Vietnam, penulis menggarisbawahi kedekatan dan kerjasama yang dilakukan oleh Vietnam dan Laos dengan regionalisme ASEAN, integrasinya dalam organisasi atau rezim ekonomi politik internasional, serta secara khusus kerjasama dengan Tiongkok pada usaha reformasi ekonominya. Sudut pandang inilah yang akan digunakan penulis untuk menganalisis latar belakang perbedaan tingkat progresivitas reformasi ekonomi Vietnam dan Laos.

### **Model Reformasi Ekonomi Gradualis**

Penstudi model reformasi ekonomi, Marangos (2002) menyebutkan bahwa strategi gradualisme merupakan resesi transformasional untuk mencegah gejolak di masyarakat dengan melakukan strategi preventif. Pemerintah diberi pilihan, antara mengambil jalan yang lambat namun stabil, atau liberalisasi ekonomi dilaksanakan secara cepat namun melakukan penyesuaian strategi dalam prosesnya. Dalam hal ini, Vietnam dan Laos mengikuti langkah yang dilakukan Tiongkok untuk dengan mengimplementasikan model reformasi gradualis, yaitu upaya liberalisasi ekonomi dengan cara bertahap terhadap sektor-sektor penting dalam perekonomian negara. Penulis melihat bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-

negara komunis di Asia, yaitu Tiongkok, Vietnam, Laos berbeda dengan negara-negara post komunis Uni Soviet. Ketiga negara tersebut melakukan liberalisasi terhadap sektor ekonomi, namun mempertahankan sistem politik yang komunis dengan partai tunggal. Berbeda dengan sebagian besar negara-negara post komunis Uni Soviet yang juga merubah sektor politik secara.

Tiongkok, Vietnam dan Laos melakukan reformasi pada bagian yang strategis dan signifikan, namun mencegah adanya instabilitas masyarakat maupun jalannya suatu pemerintahan dengan cara reformasi yang bertahap. Penulis melihat bahwa potensi konflik akibat perubahan yang dilakukan terletak pada sektor politik. Terdapat tiga kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi; pertama, tidak semua aktor politik internal negara memandang bahwa komunisme telah usang, meskipun dalam pelaksanaannya negara-negara komunis memiliki ekonomi yang cenderung stagnan, utamanya pasca runtuhnya Uni Soviet. Kedua, dipertahankannya sistem partai tunggal mencegah terjadinya perebutan kekuasaan dalam proses reformasi yang lebih rentan akan konflik. Ketiga, liberalisasi ekonomi lebih baik dilakukan secara bertahap untuk menjembatani perbedaan pandangan aktor politik internal. Oleh karena itu, Tiongkok, Vietnam, dan Laos hanya berfokus dalam reformasi sektor ekonomi, dan mempertahankan sektor politik.

### **Reformasi Ekonomi Gradualis Vietnam**

Reformasi ekonomi Vietnam dapat dijabarkan melalui tiga strategi; pertama, strategi integrasi terhadap ekonomi internasional melalui penyesuaian iklim ekonomi internal negara, maupun relasi dengan aktor eksternal negara. Kedua, reformasi terhadap sektor tradisional yang menunjang produktivitas negara. Ketiga, reformasi institusi dan pemerataan ekonomi. Pertama adalah integrasi terhadap ekonomi internasional. Pemerintah Vietnam berfokus pada privatisasi untuk menarik masuknya investasi asing, yang didukung dengan penyesuaian dalam hukum investasi. Dalam kebijakan ini, pemerintah Vietnam memberikan status independen bagi perusahaan, yaitu melalui privatisasi dan ekuitisasi pada BUMN dengan pengalihan kepemilikan industri yang dikuasai negara secara penuh menjadi perpaduan antara milik negara dan swasta (Cuc, 2010). Dapat dikatakan bahwa pemerintah Vietnam memiliki langkah serius dalam langkah ini. Cuc (2010) menyebutkan bahwa terdapat empat tahapan dalam perubahan BUMN, diantaranya adalah; pertama, komersialisasi yang berupa usaha peningkatan otonomi dan tanggung jawab perusahaan dalam mengatur performa finansial, dengan melakukan kategorisasi terhadap perusahaan; produsen barang dan jasa strategis dan non-strategis. Kedua, merampingkan struktur perusahaan dengan registrasi ulang, menutup perusahaan yang tidak efektif, atau menggabungkan BUMN dalam sektor yang sama. Ketiga, korporatisasi dengan meningkatkan otonomi tingkat manajerial, dan

mengurangi peran pemerintah. Keempat ekuitisasi atau transfer kepemilikan dari negara ke sektor swasta dengan tiga cara; 1) mempertahankan saham negara tetap utuh namun membuka peluang bagi masuknya saham baru, 2) menjual sebagian saham yang dimiliki negara sekaligus membuka peluang bagi saham baru, dan 3) menjual keseluruhan saham yang dimiliki negara dan membuka peluang bagi masuknya saham baru. Selain melakukan perubahan pada level aktor ekonomi, pemerintah Vietnam juga melakukan perubahan pada level hukum dan birokrasi untuk menunjang masuknya investasi asing di Vietnam. Hukum Investasi Asing Vietnam disahkan pada Desember 1987, diamandemen pada 1990 dan 1992. Vietnam mengimplementasikan model kebijakan yang sebelumnya telah digunakan oleh Tiongkok pada reformasi ekonominya. Pemerintah Vietnam membentuk badan yang disebut dengan State Committee for Cooperation and Investment (SCCI), yang bertanggungjawab dalam memberikan bantuan dan pengawasan dalam kerjasama perusahaan, *joint venture*, perusahaan milik asing, dan menyetujui lisensi investasi (Nguyen, 1994).

Strategi kedua adalah reformasi terhadap sektor tradisional yang menunjang produktivitas negara. Pemerintah Vietnam telah melakukan tiga kali reformasi hukum tanah, pertama kebijakan nasionalisasi pada tahun 1953-1957, kedua kebijakan kolektivisasi pada tahun 1958-1978, serta ketiga kebijakan privatisasi pertanian mulai tahun 1989. Reformasi ini secara garis besar merupakan pergeseran dari sistem pertanian yang mengutamakan kebutuhan atau kepentingan negara, menjadi bebas untuk pemenuhan kebutuhan petani. Hal ini didukung dengan perkembangan dan insentif agrikultur yang telah dilaksanakan mulai tahun 1988-89, serta penguatan sistem hak penggunaan lahan oleh individu atau pihak swasta. Koperasi dan kelompok petani yang sebelumnya merupakan tim produsen bagi negara, kemudian berubah menjadi bersifat sukarelawan, dan mendapatkan hak untuk memproduksi dan menjual hasil pertanian secara bebas. Hingga pertengahan 1989, Vietnam telah berubah dari pertanian kolektif menjadi pertanian yang dimiliki oleh individu dan swasta (St John, 1997).

Strategi ketiga adalah reformasi institusi dan pemerataan ekonomi. Vietnam cenderung menunda reformasi pada institusi ekonomi. Reformasi institusi yang dilakukan Vietnam pada masa awal reformasi adalah mengenai sistem finansial dengan memisahkan bank sentral milik negara dan bank swasta. Kemudian dalam proses reformasi yang rawan terhadap terjadinya krisis finansial sebagai dampak dari privatisasi yang memungkinkan terjadinya *mismanagement* pada BUMN dan BUMS, pemerintah Vietnam memiliki lima paket strategi (Giau, 2009 dalam Chheang & Wong, 2012). Pertama, mengimplementasikan solusi yang diumumkan untuk membangkitkan konsumsi dan permintaan domestik. kedua, merestrukturisasi ekonomi secara gradual. Ketiga, meningkatkan eksploitasi dan ekspansi pasar untuk ekspor. Keempat, secara aktif mencegah inflasi yang sering terjadi. Kelima, secara simultan dan berkelanjutan mengurangi kemiskinan di tingkat masyarakat. Pertumbuhan

ekonomi yang terjadi di Vietnam selama masa reformasi ekonomi berjalan secara linear dengan tingkat kesejahteraan rakyat, hal ini dapat diketahui dengan menggunakan parameter *Human Development Index* (HDI) yang terus menurun dari tahun 1993 – 2002 (McCormick, 1998)

### **Reformasi Ekonomi Gradualis Laos**

Menurut Bird & Hill (2010), terdapat tiga periode reformasi ekonomi Laos. Tahap pertama, yaitu pada tahun 1987-94, reformasi lebih banyak pada sektor domestik, yaitu reformasi terhadap institusi dan birokrasi pemerintahan. Pada tahap kedua, 1995-99, reformasi perdagangan berlanjut dan lebih banyak berfokus pada restrukturisasi BUMN dan menarik investasi asing, namun lebih digunakan untuk membiayai beban terhadap reformasi birokrasi. Tahap ketiga dimulai pada tahun 2000, dengan pemulihan stabilitas makroekonomi, melanjutkan reformasi bertahap, dan melakukan integrasi pada ekonomi internasional. Dapat dikatakan bahwa Laos mulai memanfaatkan investasi asing untuk meningkatkan produktivitas ekonomi pada periode ketiga.

Tahap pertama, yaitu pada tahun 1987-94, reformasi lebih banyak pada sektor domestik, dengan merubah kinerja birokratik, memberikan sedikit otonomi kepada perusahaan untuk mengembangkan usahanya, serta melakukan reformasi pajak. Untuk mereformasi kinerja birokrasi Laos, gaji pegawai negeri meningkat dan jumlah staf dikurangi. Reformasi pajak diperkenalkan pada anggaran tahunan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari yang semula hanya bergantung pada perusahaan negara menjadi lebih beragam dari pajak bea cukai, pajak kepemilikan tanah, dan pajak perdagangan (St John, 1997). Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah mulai melakukan divestasi fungsi perbankan komersial dari Bank Negara Laos. Dalam hal ini pemerintah Laos merubah sistem perbankan yang tidak hanya melibatkan bank sentral, namun juga bank komersial baik dari pihak swasta maupun asing yang mulai berjalan baik pada tahun 1994 (Bird & Hill, 2010).

Pada tahap kedua, 1995-99, reformasi perdagangan berlanjut dan lebih banyak berfokus pada restrukturisasi BUMN. Pada bidang industri, Laos mulai memberlakukan privatisasi yang kemudian mendorong terbentuknya industri ekspor yang dimiliki oleh asing, utamanya pada sektor tekstil, kayu, dan pertambangan. Sejak 1988, investasi sebesar 500 juta USD telah masuk ke Laos untuk sektor manufaktur dan industri jasa (St John, 1997). Hal ini didorong dengan dengan implementasi undang-undang investasi baru yang memungkinkan 100 persen kepemilikan asing (Rigg, 1995). Berdasarkan catatan UNDP yang tidak dipublikasikan, walaupun reformasi ekonomi Laos memiliki tujuan utama untuk mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi, beban pada administrasi pemerintah benar-benar meningkat selama transisi, karena penerapan perubahan struktural menyeluruh menambahkan beban

administrasi tambahan pada pemerintahan. Dalam hal ini, penulis melihat adanya poin kelemahan Laos, yang mana investasi yang masuk justru lebih banyak digunakan untuk membiayai beban birokrasi akibat reformasi, tidak untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Tahap ketiga dimulai pada tahun 2000, dengan pemulihan stabilitas makroekonomi, melanjutkan reformasi bertahap, dan melakukan integrasi pada ekonomi internasional. Implementasi kebijakan ekonomi yang berbasis kebijakan ekonomi terbuka berarti meningkatnya kontribusi di perkembangan ekonomi dan meningkatnya peran di tatanan internasional (Xue, 2005). Pada hukum dan konstitusi, Laos membentuk konstitusi baru pada tahun 1990an yang diantaranya mengatur mengenai pekerja atau buruh, pegawai negeri sipil, dan manajemen pemerintahan Laos. Pada tahun 1992, Laos membentuk Department of Public Administration and Civil Service serta memberlakukan sistem klasifikasi pekerjaan berbasis pada kemampuan pendidikan dan keahlian (Fry, 2008). Selain itu, pemerintah Laos mengimplementasikan desentralisasi, yang mana kekuasaan diserahkan ke provinsi-provinsi daripada desa-desa, dan mengenali sentimen regional yang kuat di tiga wilayah utama negara tersebut, di utara, tengah dan selatan (Bird & Hill, 2010). Desentralisasi kontrol juga diimplementasi pada sektor ekonomi, yaitu pada industri dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah dengan dorongan terhadap sektor swasta, perusahaan pribadi. Contoh pelaksanaannya adalah mengizinkan perusahaan untuk menetapkan upah dan memperbaiki harga barang produksinya.

Berdasarkan pembahasan urutan strategi Vietnam dan Laos, dapat dilihat bahwa perbedaan progresivitas reformasi ekonomi dipengaruhi oleh urutan pelaksanaan strategi Vietnam yang mengutamakan masuknya modal asing. Mengacu pada kondisi ini, maka penulis melihat pentingnya pengaruh eksternal negara dalam reformasi ekonomi, yaitu dukungan modal serta akses pasar. Penulis mengkritik bahwa pendekatan internal melalui model reformasi ekonomi gradualis hanya mampu menunjukkan perbedaan urutan strategi yang dilakukan oleh Vietnam dan Laos, dan tidak mampu digunakan untuk menganalisis distingsi dalam jalannya reformasi ekonomi kedua negara yaitu faktor integrasi ekonomi internasional atau kerjasama dengan aktor eksternal yang mampu mempengaruhi penentuan strategi atau kebijakan, serta progresivitas hasil reformasi ekonomi. Penulis menggarisbawahi cara pandang yang berbeda dari Vietnam dan Laos di periode awal reformasi ekonominya, yaitu bagaimana kedua negara melihat peluang dari integrasi ekonomi terhadap progresivitas reformasi ekonomi. Hal ini terkait dengan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya suatu reformasi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih jauh mengenai integrasi ekonomi kedua negara melalui pendekatan faktor eksternal dalam reformasi ekonomi.



## **Posisi dan Relasi *Mentor* – *Mentee***

Penulis melihat bahwa faktor eksternal dalam reformasi ekonomi Vietnam dan Laos berinteraksi dalam relasi *mentor* – *mentee*, yaitu hubungan kerjasama antara negara yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi yang asimetris. Dalam hal ini, negara dengan kekuatan yang lebih besar berperan sebagai *mentor* atau pihak yang memberi pengarahannya maupun bantuan bagi negara yang memiliki kekuatan yang lebih kecil yaitu *mentee*. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada relasi yang dibentuk Tiongkok sebagai negara *mentor*, dan Vietnam dan Laos sebagai negara *mentee*. Terdapat tiga kondisi yang menunjukkan bentuk relasi *mentor* – *mentee*; pertama adalah pergeseran aktor penting dalam relasi antar negara komunis di Asia. Tiongkok, Vietnam, dan Laos telah menjalin hubungan ekonomi maupun politik sejak era komunisme Uni Soviet. Dalam hal ini Uni Soviet berperan sebagai negara induk yang memberikan bantuan, pinjaman, asistensi terhadap Tiongkok, Vietnam, dan Laos. Sejak diimplementasikannya kebijakan keterbukaan atau *glasnost* oleh Uni Soviet, ketiga negara, utamanya Vietnam dan Laos mengalami masalah karena berkurangnya bantuan yang diterima. Tiongkok mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi karena keduanya telah mengurangi intensitas kerjasama akibat perbedaan pandangan komunisme, dan telah mengimplementasikan reformasi ekonomi pada tahun 1970an. Kedua adalah dampak implementasi strategi reformasi ekonomi Tiongkok terhadap implementasi reformasi ekonomi Vietnam dan Laos pada tahun 1980an, Vietnam dan Laos mengikuti langkah reformasi ekonomi Tiongkok, serta mendapatkan bantuan dan dukungan oleh Tiongkok mulai tahun 1990an.

Ketiga, pengaruh kedekatan geografis dalam relasi baru yang terbentuk, Tiongkok tidak hanya menjadi negara aliansi komunis bagi Vietnam dan Laos. Tiongkok juga merupakan negara dengan kekuatan yang besar di kawasan, dan memiliki perbatasan langsung dengan Vietnam maupun Laos. Di sisi lain, sebelum mengimplementasikan reformasi ekonomi, Vietnam dan Laos merupakan negara yang perekonomiannya tertutup. Proses reformasi ekonomi menuju ekonomi liberal membutuhkan asistensi oleh negara lain yang telah berproses dalam konstelasi ekonomi politik internasional. Tiongkok kemudian menjadi salah satu kekuatan penting untuk menjadi jembatan Vietnam dan Laos untuk memasuki konstelasi ekonomi politik internasional. Berdasarkan elaborasi singkat mengenai kondisi eksternal yang mempengaruhi proses reformasi ekonomi Vietnam dan Laos, penulis menganalisis dua hal dalam strategi reformasi ekonomi Vietnam dan Laos. Pertama adalah posisi dan relasi Vietnam dan Laos dalam bentuk interaksi *mentor* – *mentee*. Posisi dalam hal ini mengacu pada persepsi yang dibentuk Vietnam dan Laos dalam integrasi ekonomi politik internasional. Relasi membahas mengenai bentuk relasi *mentor* – *mentee* yang dilakukan Vietnam dan Laos

terhadap Tiongkok. Bagian kedua adalah analisis perbandingan posisi dan relasi antara Vietnam dan Laos.

### **Posisi dan Relasi *Mentor* – *Mentee* Vietnam**

Pertama adalah pembahasan mengenai cara Vietnam mempersepsikan posisi negaranya. Vietnam memiliki strategi khusus untuk memosisikan dirinya diantara negara-negara yang memiliki perekonomian yang berkembang relatif cepat, utamanya berkaitan dengan kekuatan yang asimetris dengan Tiongkok. Dalam hal ini Vietnam telah mempersiapkan kerjasama dengan aktor lain yang menjadi penyeimbang hubungannya dengan Tiongkok. Pertama adalah mengenai normalisasi hubungan dengan Tiongkok. Vietnam dan Tiongkok merupakan negara yang berbatasan langsung, utamanya bagian utara Vietnam. Sebagai negara yang berdekatan secara alami, keduanya memiliki potensi konflik maupun keuntungan masing-masing. Pada tahun 1980an adalah pragmatisme ekonomi yang dilakukan. Vietnam memandang Tiongkok sebagai negara komunis yang telah menggantikan posisi Uni Soviet dalam memberikan bantuan ekonomi pasca Perang Dingin. Disamping agresifitas Tiongkok dalam masalah sengketa wilayah dengan Vietnam, hubungan ekonomi dengan Tiongkok akan memberikan dampak positif dalam proses reformasi ekonomi Vietnam (Hiep, 2013).

Kedua adalah *soft balancing* yang dilakukan Vietnam pada tahun 1990an. Dalam hal ini, Vietnam menjalin hubungan kerjasama diplomatik strategis dengan aktor yang berpengaruh secara politik maupun ekonomi. Aktor-aktor strategis tersebut diantaranya adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, India, dan negara-negara Eropa (Hiep, 2013). Ketiga adalah melakukan kerjasama yang lebih dekat dengan ASEAN, dan menarik masuknya bantuan ekonomi dari Barat. Dalam integrasi dengan ASEAN, pada Juli 1992, Vietnam dan Laos menandatangani Treaty of Amity and Co-operation pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila dan mendapatkan status sebagai negara *observer*.

Pembahasan kedua adalah relasi *mentor* – *mentee* antara Tiongkok dan Vietnam. Relasi ini dapat digambarkan melalui dua kondisi; pertama adalah mengenai implementasi strategi reformasi gradualis Tiongkok. Pada Februari 1997, anggota partai Politburo Central Committee Nguyen Tan Dung mengunjungi Beijing dengan tujuan untuk mempelajari pengalaman dan kesuksesan Tiongkok dalam reformasi dan ekonomi terbuka yang dilakukan (Guan, 1998). Vietnam cenderung berfokus pada strategi eksternal dengan menarik masuknya investor asing, sedangkan Laos lebih berfokus untuk menstabilkan sektor internal sebelum masuknya pengaruh asing dalam ekonomi. Berdasarkan elaborasi persamaan urutan strategi Vietnam dan Tiongkok, dapat dikatakan bahwa Vietnam mampu memanfaatkan pengaruh eksternal berupa inspirasi dengan baik untuk membangun ekonomi progresif. Kedua adalah kerjasama strategis yang dibentuk Tiongkok dan Vietnam, utamanya di daerah yang

berbatasan langsung. Kerjasama yang dilakukan antara Tiongkok dan Vietnam diantaranya adalah pertama adalah perdagangan di perbatasan, baik secara legal atau ilegal (Xiaosong & Womack, 2000). Kedua adalah investasi yang awalnya lebih banyak dilakukan di provinsi perbatasan, namun pada akhir tahun 1990an kerjasama juga banyak dilakukan di daerah yang lain. Proyek kerjasama ekonomi dan teknologi yang pertama dilakukan adalah revitalisasi teknologi manufaktur pupuk kimia dan nitrogen di Ha Bac. Sejak saat itu, investasi Tiongkok ke Vietnam semakin meningkat, diantaranya adalah pinjaman tanpa bunga sebesar 17,5 juta yuan untuk mengimpor peralatan dan mesin, kontrak antar perusahaan Tiongkok untuk memperbaiki jalan raya di kawasan perbatasan. Hubungan yang dilakukan lebih banyak berupa barter, yang mana Tiongkok menyediakan tenaga kerja dan mendapatkan material yang dibutuhkan, dan Vietnam mendapatkan transfer teknologi, mesin, dan dapat membangun proyek tanpa menggunakan devisa negara.

**Tabel 1. Aliran Dana dari Tiongkok ke Vietnam**

<b>Tahun</b>	<b>Dukungan Tiongkok ke Vietnam</b>
<b>1994 – 2004</b>	Bantuan untuk pembangunan Vietnam sebesar 320 Juta USD, termasuk didalamnya 50 Juta USD untuk proyek industri Tiongkok di Vietnam
<b>2002</b>	Hutang dengan bunga ringan sebesar 50 juta Yuan untuk Kementerian Keuangan Vietnam
<b>2003</b>	Tiongkok memberikan hutang sebesar 104 juta Yuan untuk proyek tembaga Sin Quyen, proyek tenaga termal Cao Ngan, serta proyek bauksit Dac Nong
<b>2005</b>	Hutang dengan bunga ringan dan bantuan dana total sebesar 1,7 Milyar Yuan, dengan 60 Juta Yuan merupakan bantuan dana untuk proyek jalur kereta api.
<b>2006</b>	Investasi 32 Juta USD untuk perusahaan Ha Bac Nitrogenous Fertilizer yang dibangun Tiongkok di Vietnam 1960
<b>2008</b>	Perjanjian dua pihak mengenai pinjaman bunga ringan dan kredit untuk pemerintahan Vietnam

(Zhenming, 2008)

Ketiga adalah membentuk daerah kerjasama ekonomi. Daerah atau distrik kerjasama ekonomi merupakan kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, lembaga provinsi dan nasional, serta akademisi Tiongkok maupun vietnam untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara, utamanya di sepanjang kawasan yang berbatasan. Keempat adalah pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan dan administrasi perkotaan. Kerjasama ini dilakukan untuk mengatasi kondisi perbatasan yang terbelakang, infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan tingkat administrasi kota yang kurang berkembang. Situasi ini tidak

sesuai dengan kebutuhan reformasi dan keterbukaan. Oleh karena itu, pada 1990-an, Tiongkok dan Vietnam meningkatkan investasi di masing-masing daerah perbatasan, yang menargetkan pembangunan infrastruktur secara khusus, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan. Hingga tahun 2000, kedua negara telah menyelesaikan proyek pembangunan jalan raya antar perbatasan, proyek pembuatan saluran listrik, pembangunan jembatan di atas Sungai Beilun, pemasangan sekitar 5.000 telepon, pembangunan fasilitas seperti Pelabuhan Zhushan, hotel berstandar internasional di Dongxing, pusat perbelanjaan, gedung sekolah, rumah sakit, dan gedung balai kota baru, dan pengairan (Xiaosong & Womack, 2000). Selain pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan fasilitas publik, Tiongkok dan Vietnam juga meningkatkan pembangunan di industri jasa seperti perbankan dan asuransi, serta administrasi kota.

### **Posisi dan Relasi *Mentor* – *Mentee* Laos**

Pertama adalah mengenai persepsi Laos terhadap posisi negaranya. Laos merupakan negara yang *landlocked* secara geografis, yaitu posisi geografis yang berbatasan dengan kawasan negara lain, dan tidak memiliki wilayah laut. Kondisi ini dalam beberapa hal mempengaruhi cara pemerintah memosisikan negaranya dalam konstelasi ekonomi politik internasional. Laos menyatakan komitmen untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga, namun dalam pelaksanaannya Laos memiliki kontradiksi dalam usaha integrasi subregional. Bagian ini merupakan elaborasi mengenai keterlibatan Laos dalam integrasi di kawasan, serta kontradiksi internal akibat kekhawatiran Laos. Pemerintah Laos memandang bahwa integrasi subregional harus diseimbangkan dengan integrasi nasional, yang mana perdagangan dengan negara tetangga sama pentingnya dengan perdagangan internal dengan daerah atau provinsi yang lebih miskin dan pinggiran (Stuart-Fox, 1995). Berkaitan dengan perspektif tersebut, pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan akses yang menghubungkan perdagangan antara negara tetangga, namun berfokus pada infrastruktur transportasi dan telekomunikasi internal negara, menghubungkan antara kawasan utama dan pinggiran.

Meskipun cenderung memproteksi diri, Laos juga mengimplementasikan strategi integrasi kawasan, namun dapat dikatakan tertunda atau terlambat. Seperti yang telah penulis jabarkan pada pembahasan pertama mengenai bagaimana Laos memosisikan diri, pemerintah Laos telah terlibat dalam pembuatan wacana untuk integrasi kawasan sejak tahun 1991, namun pemerintah Laos baru benar-benar melaksanakan integrasi kawasan pada tahun 2007. Laos menginisiasi kerjasama untuk integrasi kawasan, yaitu untuk merubah perspektif dalam memandang kondisi *land-locked* menjadi *land-linked* atau terhubung melalui daratan. Hal ini tidak hanya membangun fasilitas yang menghubungkan antar negara, namun juga untuk menoptimalkan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki Laos.

Pembahasan kedua adalah relasi *mentor – mentee* antara Tiongkok dan Laos. Meskipun Vietnam dan Laos sama-sama membentuk relasi yang bersifat *mentor – mentee* dengan Tiongkok, terdapat dua perbedaan dalam relasi yang dibentuk. Pertama, dalam posisinya sebagai *mentee*, Laos mempelajari strategi yang dilakukan oleh negara *mentor*, namun mengimplementasikan urutan strategi yang berbeda dibanding Tiongkok dan Vietnam. Hal ini dapat dilihat dari analisis strategi reformasi ekonomi gradualisme. Kedua, bentuk investasi maupun bantuan yang diberikan oleh negara *mentor* cenderung lebih banyak pada pembangunan infrastruktur, bukan dalam sektor yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Dua perbedaan tersebut menjadi acuan penulis untuk mengelaborasi relasi *mentor – mentee* yang dibentuk Laos.

Momentum relasi relasi *mentor – mentee* Tiongkok dan Laos dapat dikatakan bersamaan dengan momentum tiga puluh tahun kerjasama diplomatik Laos dan Tiongkok pada tahun 1991. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kerjasama bilateral secara drastis antara kedua negara, yang mana Tiongkok menyepakati untuk meningkatkan bantuan ke Laos. Kerjasama yang dilakukan terbagi dalam berbagai level – parlemen, militer, delegasi persahabatan, hubungan provinsi ke provinsi, serta perdagangan antar negara (Stuart-Fox, 1992). Bentuk kerjasama antara Tiongkok dan Laos diantaranya adalah; pertama, dalam bidang akses yaitu pembukaan jalur penerbangan oleh maskapai Tiongkok, bantuan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur jalan di Laos, utamanya di kawasan utara Laos, yaitu yang berdekatan dengan perbatasan Tiongkok. Kedua, bidang ekonomi, salah satunya dalam proyek pembangunan dam untuk meningkatkan produksi hidrolistrik di Laos, serta pembangunan pabrik perusahaan-perusahaan Tiongkok di Laos. Selain proyek tersebut, Tabel 5 berikut dapat menggambarkan bentuk investasi yang diberikan Tiongkok pada Laos.

**Tabel 2. Aliran Dana dari Tiongkok ke Laos**

<b>Tahun</b>	<b>Dukungan Tiongkok ke Laos</b>
<b>1997-2007</b>	Bantuan pembangunan dengan kisaran 280 Juta USD
<b>1998-2001</b>	Bantuan pembangunan dengan kisaran 330 Juta USD
<b>2003</b>	Bantuan 5 Milyar USD dan 500 ribu Yuan untuk proyek Mekong waterway
<b>2004</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan 10 Milyar Yuan untuk perbaikan Triumphal Arch Park</li> <li>- Bantuan 30 Milyar USD untuk pembangunan jalan raya sepanjang 85 Km di Laos utara dalam proyek Kunming-Bangkok highway</li> </ul>
<b>2006</b>	- Bantuan 500 ribu USD untuk pembangunan pusat rehabilitasi narkoba

	- Pinjaman 200 Milyar USD dalam kunjungan Presiden Tiongkok Hu Jintao ke Laos
<b>2008</b>	- Pinjaman 100 Milyar USD untuk proyek telekomunikasi, <i>transmission line</i> , dan infrastruktur di Laos - Pinjaman bunga ringan sebesar 546 Milyar Yuan untuk proyek <i>electronic affairs</i> - Donasi sebesar 500 ribu USD untuk produksi beras Laos

(Zhenming, 2008)

Dapat dilihat bahwa investasi Tiongkok ke Laos lebih banyak pada sektor pembangunan, utamanya peningkatan akses Tiongkok menuju Asia Tenggara melalui Laos. Tiongkok memiliki kepentingan khusus dari bantuan pembangunan Laos. Thayer (2014) menyebutkan tiga kepentingan utama Tiongkok di Laos. Pertama, dukungan Laos pada kebijakan Tiongkok dalam isu Taiwan hingga Tibet. Kedua, akses perusahaan Tiongkok pada sumber daya alam Laos. Ketiga, rute transportasi dari Tiongkok-Laos-Thailand.

### **Analisis dan Kesimpulan**

Penulis menganalisis reformasi ekonomi Vietnam dan Laos melalui dua perspektif; pertama faktor internal dengan menganalisis strategi reformasi yang diimplementasikan negara. Perspektif pertama lebih kepada aplikasi pendekatan reformasi ekonomi gradualis yang digunakan penstudi barat untuk menganalisis perubahan negara-negara komunis. Pendekatan ini memiliki kekurangan yaitu tidak mampu menggambarkan distingsi dari proses reformasi ekonomi yang dimiliki negara-negara komunis di Asia, diantaranya Tiongkok, Vietnam, dan Laos. Reformasi ekonomi negara-negara Asia menunjukkan tingginya tingkat kerjasama antar satu negara dengan negara yang lain, dapat dilihat dari besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan, serta bagaimana cara Vietnam dan Laos memanfaatkan relasi dengan Tiongkok untuk meningkatkan progresivitas ekonominya. Hal inilah yang meningkatkan urgensi untuk menganalisis reformasi ekonomi Vietnam dan Laos melalui perspektif kedua, yaitu faktor eksternal dengan menganalisis posisi kedua negara di dunia internasional, serta analisis terhadap relasi yang dibangun dengan negara-negara yang dianggap penting.

Pertama adalah perbandingan strategi reformasi gradualis yang dilakukan Vietnam dan Laos. Urutan strategi reformasi ekonomi Laos adalah; pertama reformasi institusi, kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, liberalisasi dan stabilisasi harga. Ketiga, privatisasi, kebijakan perdagangan internasional. Penstudi reformasi ekonomi Laos, Phimphanthavong (2012) memandang bahwa untuk mencapai keuntungan yang lebih, reformasi ekonomi harus mencapai integrasi yang lebih kuat terhadap ekonomi internasional. Hal ini disebabkan oleh

perekonomian Laos yang lebih responsif terhadap kerjasama dengan negara-negara tetangga, atau dapat dikatakan bahwa perekonomian Laos bergantung pada kerjasama dengan negara tetangga. Penulis melihat bahwa pada periode awal reformasi ekonominya, Laos tidak mampu memaksimalkan kondisi dan karakteristik ekonominya. Apabila dikaitkan dengan urutan atau preferensi strategi reformasi gradualis yang dimiliki Laos, pertama, kebijakan yang diutamakan oleh Laos cenderung berfokus ke dalam. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk memperkuat internal negara dengan kebijakan pemerataan akses, ekonomi, fasilitas publik dan lain-lain sebelum kemudian berproses dalam integrasi ekonomi internasional. Kedua, berbeda dengan tahapan strategi reformasi Vietnam yang mengutamakan masuknya investasi asing pada periode awal, pemerintah Laos cenderung mengutamakan reformasi institusi dan desentralisasi otonomi pada periode awal. Laos memperkuat kondisi internal negara untuk menghadapi reformasi ekonomi. Kondisi internal ini dalam konteks yang menyeluruh, yaitu dari sisi penguatan institusi, serta usaha untuk mengatasi ketimpangan fasilitas dan finansial yang ada di masyarakat.

Pembahasan kedua, pembahasan mengenai persepsi Vietnam dan Laos dalam memandang posisinya. Penulis melihat bahwa Vietnam dan Laos kurang lebih menghadapi permasalahan yang sama, yaitu transisi menuju perekonomian terbuka dengan kondisi geografis diapit oleh negara-negara dengan perekonomian yang berkembang relatif pesat. Dalam menghadapi kondisi ini, Vietnam dan Laos memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang kondisi geografis negaranya. Vietnam dapat dikatakan memiliki strategi yang matang dalam menghadapi kondisi negaranya, utamanya mengacu pada sifat hubungannya dengan Tiongkok yang konfliktual. Vietnam mampu berjaga-jaga dengan membentuk kerjasama dengan berbagai aktor untuk mengamankan posisinya, diantaranya kerjasama dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, serta ASEAN. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Laos, kondisi geografis negara justru menyebabkan adanya insecurities. Utamanya pada periode awal reformasi ekonomi, yang mana Laos menunda kerjasama integrasi kawasan, dan mengutamakan pembangunan internal. Penulis melihat hal ini sebagai strategi yang kurang strategis, menimbang keterbatasan modal Laos dalam pembangunan, serta sifat ekonomi negaranya yang bergantung dengan hubungan ekonomi luar negeri. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan Laos untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi di kawasan.

Pembahasan ketiga, berdasarkan relasi *mentor – mentee* dengan Tiongkok yang menunjukkan perbedaan kepentingan. Hal ini mengacu pada tabel 1 dan 2, yaitu aliran dana yang masuk dari Tiongkok ke Vietnam maupun Laos. Dapat dilihat bahwa sifat investasi Tiongkok ke Vietnam cenderung dalam bidang industrialisasi, sedangkan investasi ke Laos lebih banyak pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Penulis melihat bahwa

Tiongkok memiliki persepsi yang berbeda terhadap Vietnam dan Laos. pertama, dalam relasi *mentor – mentee*, tidak hanya Tiongkok yang penting bagi Vietnam, namun juga sebaliknya. Tiongkok memandang Vietnam sebagai rekan ekonomi yang memiliki persamaan dalam hambatan, tantangan dan prospek kedepannya. Hal ini didukung dengan langkah Vietnam untuk menyamakan urutan strategi reformasi gradualis yang telah dilaksanakan Tiongkok, yang mana memudahkan masuknya investasi asing pada periode awal reformasi ekonomi. Dengan begitu, Tiongkok mendapatkan akses yang mudah terhadap sumber daya alam yang dimiliki Vietnam, dan Vietnam dapat meningkatkan industrialisasi dibantu dengan transfer teknologi dari Tiongkok. Kedua, Tiongkok memandang Laos sebagai akses terhadap negara-negara Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa perbedaan kepentingan ini mempengaruhi progresivitas reformasi ekonomi Vietnam dan Laos, karena Tiongkok memberikan investasi terhadap sektor yang berbeda.

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh internal maupun eksternal dalam reformasi ekonomi, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga poin penting dalam progresivitas reformasi ekonomi adalah; pertama, menemukan kondisi, sifat, dan karakteristik ekonomi, masyarakat, dan sejarah yang dimiliki suatu negara. Kedua, menentukan strategi yang sesuai untuk memaksimalkan progresivitas reformasi ekonomi. Hal ini penting untuk menyesuaikan antara faktor internal dan memanfaatkan relasi dengan negara-negara yang penting, memaksimalkan potensi kawasan, serta membangun akses ke pasar internasional. Berdasarkan kasus yang menjadi fokus penulis, dapat dilihat bahwa konteks penelitian yang penting adalah mengenai reformasi ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah yang memiliki kekuatan besar untuk mengatur jalannya politik maupun ekonomi, serta dipengaruhi oleh relasi *mentor – mentee*, dengan negara dengan kekuatan asimetris, namun memberikan dampak positif bagi reformasi ekonomi.



## Daftar Pustaka

- Chheang, Vannarith & Yushan Wong. 2012. Cambodia-Laos-Vietnam: Economic Reforms and Sub-regional Integration [Online] Tersedia dalam <http://www.cantholib.org.vn/DataLibrary/Images/Cambodia-Lao-Vietnam-Economic%20reform.pdf>. [Diakses pada 22 November 2016]
- Cuc, Nguyen Thi Kim. 2010. The Politics Of Economic Reform In Vietnam: A Case Of State-Owned-Enterprise Equitization. Department of Political Science National University of Singapore.
- Cuc, Nguyen Thi Kim. 2010. The Politics Of Economic Reform In Vietnam: A Case Of State-Owned-Enterprise Equitization. Department of Political Science National University of Singapore.
- Cuc, Nguyen Thi Kim. 2010. The Politics Of Economic Reform In Vietnam: A Case Of State-Owned-Enterprise Equitization. Department of Political Science National University of Singapore.
- Freeman, Nick J., 2004. LAOS: Exiguous Evidence of Economic Reform and Development dalam *Southeast Asian Affairs*. ISEAS - Yusof Ishak Institute
- Gates, Carolyn L., 1995. Foreign Direct Investment, Institutional Change, And Vietnam's Gradualis Approach To Reform dalam *Southeast Asian Affairs*. ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Gates, Carolyn L., 1996. Economic Reform and Openness in Vietnam: Micro-economic Response and Transformation dalam *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 13, No. 2, *VIETNAM IN ASEAN: Economic Reform, Openness and Transformation*. ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Guan, Ang Cheng. 1998. Vietnam-China Relations since the End of the Cold War dalam *Asian Survey*, Vol. 38, No. 12, pp. 1122-1141. University of California Press
- Hiep, Le Hong., 2013. Vietnam's Hedging Strategy against China since Normalization dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 35, No. 3. ISEAS - Yusof Ishak Institute
- Jacoby, Wade. 2005. "External Influences on Post communist Transformations: A Review Essay." [online] Tersedia dalam [http://www.ptesc.ssc.upenn.edu/Paper\\_pdf/Jacoby\\_Review\\_Essay\\_for\\_PTESC.doc](http://www.ptesc.ssc.upenn.edu/Paper_pdf/Jacoby_Review_Essay_for_PTESC.doc). [Diakses pada 22 November 2016].

Marangos, John. 2002. Alternative Methods of Institutional Development for Transition Economies dalam *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*. pp. 483-513. Mohr Siebeck GmbH & Co. KG

St John, Ronald Bruce. 1997. End of the Beginning: Economic Reform in Cambodia, Laos, and Vietnam dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 19, No. 2, pp. 172-189. ISEAS - Yusuf Ishak Institute

Xue, H. Q. 2005. "China's Open Policy and International Law," *Chinese Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, , pp. 133-139. doi:10.1093/chinesejil/jmio04

Zhenming, Zhu. 2008. China's Economic Aid to CLMV and Its Economic Cooperation with Them. [online] Tersedia dalam [http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/pdf/01\\_chinaseconomic.pdf](http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/pdf/01_chinaseconomic.pdf) [Diakses pada 3 November 2016].